

BAB II

KEJAHATAN BERBASIS *GENDER* (GBV) DI AFRIKA SELATAN DAN RESPONS PEMERINTAH AFRIKA SELATAN

2.1. Definisi *Gender-Based Violence*

Secara garis besar, *Gender-Based Violence* (GBV) atau kekerasan berbasis *gender* merujuk pada tindak kekerasan yang terjadi sebagai akibat dari ekspektasi peran yang normatif dan saling berkaitan dengan masing-masing *gender*, diiringi dengan ketimpangan relasi kuasa yang signifikan antara kedua *gender* dalam konteks masyarakat dan lingkungan tertentu. (Bloom, 2008). Selain itu, menurut CEDAW, GBV yaitu suatu bentuk diskriminasi yang sangat menghambat kemampuan perempuan untuk menikmati hak dan kebebasan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki (UN Women, 1979).

Terlebih lagi, berdasarkan data statistik yang dimuat dalam *The Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, wanita lebih banyak menjadi korban kekerasan berbasis *gender* dibandingkan dengan pria (Kallermann, 1992). Hal ini dapat dibuktikan dengan perbandingan korban *intimate partner violence* (IPV), yang merupakan salah satu jenis GBV dan juga telah menjadi krisis kesehatan global, sebesar 1:4 wanita merupakan korban IPV, sementara untuk korban pria perbandingannya adalah 1:9 pria. IPV sendiri juga kemudian dibagi ke dalam beberapa jenis kekerasan, di antaranya adalah pemerkosaan, kekerasan seksual, serta *dowry-related*

violence atau kekerasan yang berkaitan dengan mas kawin seorang perempuan (Velopulos, 2016).

Dalam penelitian ini, tipe GBV yang akan menjadi fokus penelitian adalah pemerkosaan, baik yang dilakukan oleh orang asing maupun pemerkosaan yang dilakukan terhadap pasangannya (*marital rape*). Lebih lanjut, meskipun pemerkosaan juga dapat digolongkan sebagai kejahatan (*crime*) karena merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, namun perspektif yang akan diambil dalam penelitian ini akan memandang pemerkosaan sebagai kekerasan (*violence*), yakni serangan fisik yang merugikan orang lain.

Pemerkosaan, khususnya yang dilakukan terhadap pasangan, kerap kali menjadi dampak dari hubungan yang tidak sehat yang terus dijalani. Meskipun seiring dengan berjalannya waktu kasus *marital rape* telah mendapat perhatian dari banyak pihak, namun hingga kini masih terdapat beberapa negara yang melegalkan *marita rape*. Selain itu, banyak perempuan yang tidak berani melaporkan kasus *marital rape* yang dialami karena terdapat kesenjangan sosial serta kondisi ekonomi, khususnya dalam rumah tangga di mana hanya sosok ayah atau suami yang bekerja dan memiliki penghasilan (Sweeney, 2020).

Maraknya mitos terkait kasus pemerkosaan, atau kerap kali dikenal dengan istilah *rape myths*, juga menyebabkan masih minimnya upaya untuk memberantas pemerkosaan. Mitos tersebut berkaitan dengan definisi dari pemerkosaan, yaitu suatu perbuatan baru dapat digolongkan sebagai

aksi pemerkosaan ketika pelaku merupakan orang asing dan menggunakan senjata untuk mendominasi korban, serta korban harus mengalami cedera atau luka fisik untuk membuktikan aspek “kekerasan”. Mitos lainnya adalah bahwa seorang pasangan tidak dapat melakukan pemerkosaan karena adanya ikatan di antara pelaku dan korban berupa hubungan romantis (Lilley, Willmott, Mojtahedi, & Labhardt, 2023).

Mitos-mitos inilah yang kemudian menyebabkan banyaknya kasus pemerkosaan, terutama *marital rape*, yang tidak dilaporkan. Hal ini disebabkan karena minimnya simpati dan bantuan yang tersedia bagi korban untuk melindungi diri dari aksi kekerasan yang telah dialami.

2.1.1. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Meskipun kekerasan secara umum didefinisikan sebagai serangan fisik yang merugikan orang lain seperti yang telah dijelaskan di atas, kekerasan sejatinya dibagi ke dalam empat tipe yang berbeda, yakni kekerasan langsung (*direct violence*), kekerasan tidak langsung (*indirect violence*), kekerasan budaya (*cultural violence*), serta kekerasan tersembunyi (*hidden violence*). *Pertama*, kekerasan langsung merupakan tipe kekerasan yang umum diketahui, yakni suatu perbuatan yang mengancam keamanan seseorang. Adapun beberapa contoh kekerasan langsung di antaranya adalah pembunuhan, *bullying*, kekerasan seksual, maupun manipulasi kondisi emosional.

Kedua, kekerasan tidak langsung, atau juga dikenal sebagai kekerasan struktural, merupakan kekerasan yang dilakukan secara

sistematis oleh kelompok penguasa atau kelompok dominan dan bertujuan untuk merugikan kelompok lain yang menjadi minoritas. Beberapa contoh kekerasan struktural adalah kejahatan apartheid di Afrika Selatan, keterbatasan akses pendidikan dan ekonomi bagi kelompok marjinal, dan sejenisnya.

Ketiga, kekerasan budaya adalah suatu mispersepsi norma sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok budaya terhadap kelompok budaya lainnya. Contohnya adalah persepsi kesenjangan rasial, di mana masyarakat Afrika dinilai “primitif” atau “bar-bar” jika dibandingkan dengan masyarakat Eropa. Contoh lain adalah mispersepsi bahwa masyarakat Timur Tengah dan Amerika Latin cenderung lebih sering melakukan kejahatan dibandingkan dengan masyarakat di Amerika Utara (Galtung, 1990).

Keempat, kekerasan tersembunyi kerap kali dikaitkan dengan keengganan korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Selain itu, suatu kekerasan juga dapat digolongkan sebagai tersembunyi ketika dampak dari segi kesehatan maupun segi sosial tidak dapat terlihat secara nyata dalam jangka waktu yang lama (Mercy, et al., 2017).

Berdasarkan pengelompokan di atas, penelitian ini menggolongkan GBV, khususnya pemerkosaan, ke dalam kelompok kekerasan tersembunyi. Hal ini disebabkan karena meskipun kekerasan seksual secara umum tergolong ke dalam kekerasan langsung karena

terjadi proses langsung untuk melukai atau menyakiti korban, namun dalam hal ini pemerkosaan tergolong ke dalam kekerasan tersembunyi karena sebagian besar korban kerap kali merasa enggan untuk melaporkan kekerasan yang dialami. Selain itu, dampak dari pemerkosaan kerap kali tidak langsung terlihat, melainkan membutuhkan waktu yang lama. Contohnya, pemerkosaan dapat membuat korban berada dalam rasa paranoia dan tekanan berlebih, sehingga mempengaruhi kondisi kesehatan mental seiring dengan berjalannya waktu. Pemerkosaan juga dapat membuat korban merasa kesulitan untuk mempercayai orang lain dan merasa tidak nyaman dengan kontak fisik sekecil apapun, sehingga jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, dapat mempengaruhi kehidupan sosial korban.

2.2. Sejarah Perkembangan CEDAW

Sejarah menunjukkan bahwa perempuan sering kali dianggap sebagai kelas dua dalam struktur sosial masyarakat secara umum sebelum meletusnya Perang Dunia I dan II. Hal ini terlihat dari kondisi anggota negara-negara PBB ketika baru didirikan pada tahun 1945. Pada tahun tersebut, hanya 25 dari 51 negara anggota yang sudah memberikan hak suara kepada perempuan (Intergovernmental Support Division UN Women, 2019).

Oleh karena itu, dalam sidang umum PBB pada tahun 1946, Eleanor Roosevelt membacakan surat terbuka kepada perempuan di seluruh dunia untuk mengambil peran yang lebih aktif di dalam politik dan

pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa hari setelah pembacaan surat terbuka tersebut, dibentuklah *Subcommission on the Status of Women*, di bawah *Commission on Human Rights*. Subcommission ini nantinya berubah menjadi *Commission on the Status of Women* pada 21 Juni 1946.

Ada banyak tantangan yang dihadapi komisi untuk mempromosikan kesetaraan *gender* dalam PBB. Tantangan besar pertama yang dihadapi adalah ketika perumusan teks *UN Declaration on Human Rights* (DUHAM). Dalam perumusan DUHAM, Commission menentang penggunaan kata ganti *men* dalam teks deklarasi, yang dinilai sensitif (Intergovernmental Support Division UN Women, 2019). Commission berhasil memberikan argumen untuk menentang hal tersebut, sehingga DUHAM menggunakan kata ganti dan bahasa yang lebih inklusif terhadap semua *gender*. Ini tentunya merupakan terobosan baru dalam perumusan teks deklarasi di tingkat internasional.

Tantangan-tantangan besar berikutnya tentunya mempromosikan hak-hak perempuan di tingkat internasional. Commission melakukan riset skala internasional untuk mengetahui keadaan dan status legal perempuan di seluruh dunia. Berdasarkan riset tersebut, Commission membuat standar dan formulasi konvensi internasional yang dapat menjangkau hak-hak perempuan. Selain itu, Commission juga mulai menyediakan akses bagi hak politik perempuan lewat sejumlah konvensi internasional.

Commission juga memperluas jangkauannya untuk menyorot hak-hak perempuan lainnya, seperti hak pendidikan bagi perempuan dan pembebasan diskriminasi dalam pernikahan bagi perempuan. Konvensi-konvensi internasional terkait pembebasan diskriminasi dalam pernikahan dikeluarkan pada dekade 1950-an, seperti *Convention on the Nationality of Married Women*, *Convention on Consent of Marriage*, *Minimum Age for Marriage and Registrations of Marriage* (Intergovernmental Support Division UN Women, 2019, hal. 6). Konvensi-konvensi ini melindungi perempuan dari pernikahan paksa dan pernikahan dini, serta menjamin hak-hak bagi perempuan yang telah menikah. Di bidang pendidikan, Commission mengembangkan program yang mengadvokasi literasi dan pendidikan bagi perempuan.

Dengan semakin banyaknya negara baru yang bergabung dalam PBB pada dekade 1960-an dan 1970-an, serta perkembangan awal era teknologi, Commission memperluas area kerjanya dengan menyoroti penerapan hak-hak perempuan di negara berkembang. Dipengaruhi oleh riset dari Ester Boserup berjudul *Women's Role in Economic Development* pada tahun 1970, serta naiknya gerakan feminisme pada saat itu, Commission mengadvokasi hak-hak perempuan dalam keterlibatan ekonomi dan sosiobudaya untuk mendukung pembangunan dalam negara. Didukung oleh stabilnya situasi pasca Perang Dunia II, Commission mulai dapat bekerja untuk menyatukan seluruh konvensi internasional perempuan yang sudah dibuat sebelumnya, untuk disatukan dengan hak-

hak perempuan lainnya yang perlu diadvokasi. Berkat penyatuan tersebut, lahirlah *Declaration on the Elimination of Discrimination against Women*. Deklarasi ini sangat penting karena dokumen ini mengkonsolidasi standar-standar hak-hak perempuan yang sebelumnya telah ada dalam konvensi internasional, kemudian menyatukannya dan menjadikannya pondasi legal dalam satu dokumen.

Atas saran dari pemerintah Rumania mewakili *Women's International Democratic Federation*, Commission merayakan hari jadinya yang ke-25 pada tahun 1972 dengan menetapkan tahun 1975 sebagai Tahun Perempuan Internasional. Commission selama dua tahun kemudian bekerja mencari tema apa yang akan digunakan untuk Tahun Perempuan Internasional pada 1975 mendatang. Commission kemudian mencetuskan dua tema, yakni kesetaraan dan pembangunan. Sidang Umum PBB kemudian menambahkan satu tema lagi, yakni pengakuan kontribusi perempuan dalam perwujudan perdamaian dunia. Akhirnya, terbentuklah tema untuk Tahun Perempuan Internasional yang pertama, yakni kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian bagi kemajuan perempuan.

Tahun Perempuan Internasional pada 1975 dirayakan dengan mengadakan konferensi internasional yang dilaksanakan di Mexico City. Konferensi tersebut mengundang 133 negara untuk berpartisipasi, serta 6000 perwakilan dari NGO untuk menghadiri forum-forum panel. Konferensi ini membahas *guidelines* komprehensif untuk mendorong

kemajuan pertama sampai tahun 1985. Konferensi ini cukup penting, karena *guidelines* ini nantinya akan menjadi panduan bagi PBB dan negara-negara lain sampai tahun 1985, di mana tahun tersebut ditargetkan untuk menaikkan *Declaration on the Elimination of Discrimination menjadi Convention on the Eliminations of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW).

Selama persiapan satu dekade Tahun Perempuan Internasional, CEDAW menjadi proyek penting yang menjadi perhatian Commission. Pembuatan draft sendiri sudah ditetapkan menjadi Plan of Actions dalam konferensi di Mexico City. Draft ini ditargetkan untuk menjadi dokumen legal yang memuat implementasi efektif dalam pencegahan semua bentuk dan jenis diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini digarap dari tahun 1976-1979 oleh grup kerja yang dibawah oleh Commission, kemudian diadaptasi oleh Sidang Umum PBB pada tahun 1979 dengan 130 negara anggota yang setuju dan 10 negara anggota yang abstain.

2.3. Proses Afrika Selatan Meratifikasi CEDAW

Afrika Selatan memiliki sejarah yang kelam jika berbicara mengenai hak asasi manusia dan kesetaraan *gender*. Politik Apartheid yang merupakan ciri khas Afrika Selatan pada akhir 1990-an merupakan sistem politik yang seras dengan diskriminasi dari berbagai aspek. Namun, periode yang sangat kelam tersebut membuat Afrika Selatan mengambil langkah yang progresif untuk membela HAM warganya. Pada masa pemerintahan Nelson Mandela, Afrika Selatan berkomitmen untuk

menjadi negara yang lebih demokratis dan menitikberatkan hak dasar universal, di mana tujuan tersebut termanifestasikan dari beberapa konvensi internasional HAM yang diratifikasi tidak lama setelah Konstitusi Sementara 1993 dibuat, antara lain: (1) CEDAW yang diratifikasi pada 1995, (2) CRC (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi pada 1995, (3) CCPR (*International Convention on Civil and Political Rights*) yang diratifikasi pada 1998, (4) CERD (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) pada 1998 dan (5) CAT (*Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) pada 1998.

Dari daftar tersebut, dapat dilihat bahwa CEDAW merupakan satu-satunya konvensi internasional yang secara spesifik melindungi hak-hak wanita yang diratifikasi oleh Afrika Selatan. Fakta tersebut terlihat sebagai angin segar bagi para wanita di Afrika Selatan, karena kejahatan berbasis *gender* telah mendarah daging di negara tersebut bahkan sejak 1940-an. Namun, selama periode sebelum Afrika Selatan meratifikasi CEDAW terutama pada periode politik Apartheid, statistik kasus GBV seperti pemerkosaan dan bentuk GBV lainnya secara konsisten kurang banyak dilaporkan dan kurang dianggap serius oleh penegak hukum Afrika Selatan, terutama jika korbannya merupakan wanita kulit hitam (George, *Gender-Based Violence Against Women in South Africa*, 2020). Hal tersebut juga bersumber dari minimnya perlindungan kasus GBV dari kacamata hukum Afrika Selatan sendiri, contohnya seperti pemerkosaan

dalam pernikahan yang tidak diakui oleh hukum Afrika Selatan sampai 1993 (Fedler, 2000), sementara beberapa sumber memberikan estimasi bahwa *marital rape* terjadi sebanyak 60% dari pasangan suami-istri di Afrika Selatan (Rape Crisis, 2001).

Meskipun begitu, proses ratifikasi CEDAW oleh Afrika Selatan tidak berjalan mulus. Pada 1993, Partai Nasional atau *Nasionalist Party* yang mendukung Apartheid pada saat itu, yang juga sayangnya menjadi partai yang paling berkuasa di Afrika Selatan, menolak nilai-nilai CEDAW karena bertolak belakang dengan situasi politik di Afrika Selatan pada saat itu (Foster, 1995). Proses perundingan pasca pembebasan politik Apartheid menimbulkan perdebatan sengit di Afrika Selatan, terutama para wanita Afrika Selatan yang memaksa pemerintah setempat untuk mendengarkan perspektif mereka mengenai bentuk-bentuk diskriminasi yang dihadapi mereka dan banyak wanita Afrika Selatan selama lebih dari satu dekade terakhir. Selama proses persiapan pemerintah Afrika Selatan sebelum mengikuti Konferensi Perempuan Dunia ke-empat di Beijing yang dilaksanakan pada 4-15 September 1995, para wanita Afrika Selatan (yang juga mendapatkan harapan dari pidato dan pemikiran Nelson Mandela mengenai pembelaan hak-hak wanita), memanfaatkan momen tersebut untuk menuntut pemerintah meratifikasi CEDAW secara penuh (tanpa *reservation*) pada Desember 1995. Tuntutan tersebut kemudian dikabulkan oleh pemerintah Afrika Selatan yaitu meratifikasi CEDAW pada 15 Desember 1995 tanpa reservasi.

Setiap negara anggota yang meratifikasi CEDAW memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan bayangan satu tahun setelah meratifikasi perjanjian internasional tersebut. Laporan bayangan tersebut menjelaskan status-quo negaranya dalam memperlakukan wanita, tingkat kejahatan terhadap wanita di negara tersebut, serta bagaimana hukum domestik terkait perlindungan hak-hak wanita di negaranya (UN Women, n.d.). Namun, Afrika Selatan baru menyerahkan laporan bayangan pertamanya pada tahun 1998, di mana seharusnya diserahkan pada tahun 1996 (Commission for Gender Equality, 2020).

2.4. Kejahatan Berbasis Gender (GBV) di Afrika Selatan Sejak Meratifikasi CEDAW

Afrika Selatan membuat langkah yang progresif dengan meratifikasi konvensi internasional CEDAW tidak lama setelah negara tersebut mengalami transformasi politik ke arah yang lebih demokratis dan terbuka. Hal tersebut yang kemudian menjadi pedoman Afrika Selatan untuk membuat dan/atau mengamandemen undang-undang domestik yang menitikberatkan kepada penghapusan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan di negara tersebut.

Pada 29 Januari 1993, Afrika Selatan menjadi salah satu *signatory* CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*), yang kemudian meratifikasi konvensi tersebut tanpa mengajukan persyaratan apapun pada 15 Desember 1995. CEDAW menjadi salah satu konvensi internasional yang diratifikasi Afrika Selatan

sejak Negara tersebut mengalami titik balik pada sistem demokrasinya melalui *1993 Interim Constitution*, yang kemudian disahkan menjadi *Constitution of the Republic of South Africa, Act 200 of 1993*. Konstitusi tersebut menitikberatkan kepada hak-hak dasar warga negara yang diterima secara universal, dan pengakuan bahwa semua orang berhak menikmati kebebasan universal tersebut (South African History Online, 2014).

Sebuah negara yang meratifikasi perjanjian internasional tentu saja harus menaati persyaratan serta tujuan dan norma yang telah disepakati bersama. Tujuan utama dari CEDAW yaitu penghapusan kejahatan dan diskriminasi *gender* antara laki-laki dan perempuan, di mana untuk mencapai hal tersebut, negara anggota diharuskan untuk melakukan beberapa perubahan dari sisi domestik, salah satunya membuat UU yang bertujuan untuk membela hak wanita, menghapus dan/atau mengamandemen UU yang bersifat diskriminatif terhadap wanita, membuat badan peradilan khusus untuk menangani kasus-kasus kekerasan *gender*, serta mengirimkan laporan bayangan kepada CEDAW *Committee* secara rutin setidaknya empat tahun sekali (dan laporan bayangan satu tahun setelah meratifikasi CEDAW). Dibalik segala usaha Afrika Selatan untuk mematuhi persyaratan perjanjian CEDAW seperti membentuk pengadilan dan lembaga publik untuk memberikan perlindungan efektif bagi wanita korban diskriminasi dan membentuk UU baru di Afrika Selatan yang membela dan melindungi wanita, fakta di lapangan dan

angka serta statistik masih menunjukkan bahwa kasus GBV di Afrika Selatan semenjak meratifikasi CEDAW masih tinggi dan terus meningkat.

Fakta bahwa Afrika Selatan meratifikasi CEDAW pada 15 Desember 1995 tentu saja tidak bisa mengurangi angka GBV secara langsung. Menurut data penelitian yang dipublikasikan di Ballard Brief AS, tiga jenis GBV yang paling banyak terjadi secara umum adalah pemerkosaan, *femicide*, dan kekerasan dalam rumah tangga atau *domestic abuse* (George, 2020). Pada studi yang dipublikasi pada tahun 1999, di mana penelitian tersebut melibatkan 1,306 wanita di beberapa provinsi Afrika Selatan, terdapat 27% wanita di Eastern Cape, 28% di Mpumalanga dan 19% wanita di Limpopo yang mengaku pernah menjadi korban GBV secara fisik oleh pasangan mereka (Abrahams N. , 1999). Penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa 51% wanita di Eastern Cape, 50% di Mpumalanga dan 40% di Limpopo pernah mengalami GBV non-fisik.

Angka GBV di Afrika Selatan masih terus tinggi, meskipun tidak selalu meningkat secara berkala. Pada tahun 2003, laporan resmi dari pemerintah Afrika Selatan menyatakan terdapat 52,733 kasus pemerkosaan yang dilaporkan per tahunnya (Times Online, 2004). Jika dibandingkan dengan angka GBV pada laporan resmi 1999 – 2000 yang berjumlah 52,891 kasus, angka di tahun 2003 memang menurun, namun tidak secara signifikan. Terlebih lagi, Afrika Selatan juga mendapat banyak julukan terkait kasus GBV-nya, salah satunya julukan “Rape Capital of the World” yang diberikan oleh Interpol kepada Afrika Selatan

(Mwali, 2012) dan “Destination of Femicide” karena Afrika Selatan sudah terkenal dengan angka GBV-nya yang tinggi sejak tahun 2000 (Global Risk Insights, 2021).

Penelitian dari The Institute for Security Studies pada 2011 menunjukkan bahwa lebih dari 50% wanita di Provinsi Gauteng pernah mengalami IPV (*Intimate Partner Violence*), di mana 80% dari pria di provinsi tersebut mengaku pernah melakukan kekerasan kepada pasangan mereka (Institute for Security Studies, 2011). Meskipun Gauteng merupakan provinsi terkecil di Afrika Selatan, tingginya presentase GBV bahkan yang korban dan pelakunya memiliki hubungan romantis sudah cukup mengkhawatirkan. Penelitian tersebut juga mengungkapkan data GBV yang terjadi di luar pria dan wanita yang berhubungan romantis, namun angka-angka tersebut sudah banyak diteliti oleh pihak lain yang penulis sudah dan akan jabarkan di penelitian ini.

Rekaman buruk lain perihal GBV di Afrika Selatan juga terjadi pada Mei 2017, ketika beberapa wanita muda di Afrika Selatan diculik dan dibunuh. Peristiwa tersebut menjadi pokok berita yang tidak hanya gempar di Afrika Selatan, tetapi juga dunia internasional (South African Human Rights Commission, 2018). Hal tersebut juga memantik munculnya tagar #MenAreTrash yang banyak tersebar di media sosial dan menjadi tombak beberapa gerakan sosial terkait GBV dan demonstrasi di Afrika Selatan pada 2017 – 2018 (Samanga, 2017).

GBV di Afrika Selatan semakin menjadi perhatian dunia dan warga Afrika Selatan sendiri ketika pemerintah menetapkan kebijakan karantina penuh saat pandemi COVID-19 (Ellis, 2020). Selama karantina, banyak korban kekerasan *gender* yang terjebak di dalam rumah dengan pasangan mereka yang melakukan kekerasan. Banyak faktor yang membuat korban GBV ini semakin terjebak dengan pasangan mereka, salah satunya ketergantungan finansial dengan partner mereka selama masa pandemi dan juga subsidi dana dari pemerintah Afrika Selatan yang minim untuk tempat bernaung para korban kekerasan berbasis *gender* (Human Rights Watch, 2021). Fakta tersebut didukung oleh pernyataan Presiden Afrika Selatan saat ini, Cyril Ramaphosa, yang mendeklarasikan GBV sebagai “pandemi kedua” dan perlu ditangani sama seriusnya seperti pandemi COVID-19 pada pidato beliau tahun 2020 lalu (Ellis, 2020).

As a country, we find ourselves in the midst of not one, but two, devastating epidemics. Although very different in their nature and cause, they can both be overcome – if we work together, if we each take personal responsibility for our actions and if we each take care of each other. It is with the heaviest of hearts that I stand before the women and girls of South Africa this evening to talk about another pandemic that is raging in our country – the killing of women and children by the men of our country. – President Cyril Ramaphosa

Meskipun pandemi juga telah berlalu, saat ini, Afrika Selatan masih berada di situasi di mana kesetaraan *gender* belum tercapai dan GBV masih “meluas, meresap, tidak dilaporkan, dan berkaitan erat dengan permasalahan sosial lainnya.” (Fakunmoju & Rasool, 2018, p.4). Selain

itu, penelitian menyatakan bahwa total antara 25 sampai 40 persen wanita Afrika Selatan pernah mengalami kejahatan baik secara fisik maupun kejahatan seksual, dan antara 12 sampai 28 persen wanita Afrika Selatan melaporkan kasus pemerkosaan ke polisi (Government of South Africa, 2020). Banyak peneliti berpendapat bahwa angka-angka tersebut tidak sepenuhnya merepresentasikan keadaan yang sesungguhnya karena banyak kasus GBV yang tidak dilaporkan oleh para korban (South African Human Rights Commission, 2018).

Afrika Selatan masih terus menjadi tempat yang memberikan mimpi buruk bagi para wanita. Tidak hanya judul berita mengenai kekerasan terhadap wanita yang masih terus bermunculan, tetapi angka dan statistik mengenai GBV juga masih tinggi. Saat ini, tercatat 10,818 kasus pemerkosaan yang dilaporkan pada kuartar pertama 2022 (Gouws, 2022). Sebagai tambahan, pada kuartar pertama 2023, terdapat 10,512 kasus pemerkosaan yang dilaporkan ke South African Police Service (SAPS), di mana tercatat provinsi KwaZulu-Natal menjadi area yang memiliki angka tertinggi pembunuhan terhadap wanita di Afrika Selatan (Kahla, 2023). Tidak hanya itu, terdapat juga 1,485 percobaan pembunuhan terhadap wanita yang dilaporkan ke SAPS, di mana 969 dari percobaan tersebut telah berhasil membunuh korbannya (Cruywagen, 2023). Masih perlu diingat bahwa angka yang dipublikasikan di laporan-laporan resmi dari pemerintah dan SAPS masih banyak diragukan oleh beberapa peneliti dan aktivis karena, masih sama seperti permasalahan di Afrika Selatan sejak

politik Apartheid masih berdiri, banyak korban GBV yang enggan melapor ke polisi karena kepercayaan masyarakat yang rendah dan kultur patriarki dari pihak berwenang yang masih kental (Vetten, 2005). Namun, judul berita, statistik, dan laporan yang menunjukkan angka GBV di Afrika Selatan yang sudah terpublikasi selama ini sudah cukup tinggi untuk menunjukkan bahwa usaha Afrika Selatan untuk memberikan dan menjamin hak-hak dasar kepada warga wanitanya masih sangat panjang.

2.5. Respons Pemerintah Afrika Selatan Terhadap GBV Setelah Meratifikasi CEDAW

Pasca meratifikasi CEDAW, pekerjaan Afrika Selatan dalam mengurangi tingginya angka GBV di negaranya masih menjadi tantangan berat. Selain meratifikasi CEDAW, Afrika Selatan juga baru memulai perubahan politiknya ke arah yang lebih demokratis pada 1994 dan pemerintahan Afrika Selatan mulai menitikberatkan kepada aspek-aspek HAM dan kesetaraan warga negaranya. Pada sub-bab ini, penulis akan menjabarkan respons yang diberikan dan aksi yang dilakukan oleh beberapa Presiden Afrika Selatan terhadap GBV pasca ratifikasi CEDAW hingga tahun 2023.

2.5.1. Nelson Mandela: Pelopor Kesetaraan *Gender* di Afrika Selatan

Konstitusi Afrika Selatan yang diresmikan pada Mei 1996 merupakan titik balik dari politik Afrika Selatan, karena konstitusi tersebut serasi dengan tujuannya membela hak-hak dasar warga negara Afrika dan penghapusan segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi *gender*. Salah satu

pencapaian terbesar Afrika Selatan tersebut terjadi pada masa pemerintahan Nelson Mandela.

Tidak hanya menjadi pelopor berakhirnya segregasi antara masyarakat kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan, Nelson Mandela juga terkenal dengan usahanya mengakhiri ketidaksetaraan *gender*, dan tentu saja GBV yang telah menjamur di Afrika Selatan sejak lama. Nelson Mandela juga menyebutkan dalam pidatonya di Cape Town pada 8 Mei 1994, bahwa kesetaraan *gender* merupakan bagian integral dalam usaha mencapai kebebasan hidup dan bermasyarakat (Tshabalala, 2021).

We must be honest and open about the power relationships between men and women in our society, and we must help build a more enabling and supportive environment that puts the role of women centre stage in this struggle. Each one of us – sister and brother, mother and father, teacher and student, priest and parishioner, manager and worker, Presidents and Prime Ministers, must add our voice to this call for action. – Nelson Mandela.

Bukti keseriusan Nelson Mandela melampaui kalimat dan petuah beliau di konferensi resmi semata. Nelson Mandela merupakan pelopor terbentuknya *Commission for Gender Equality* pada 1995 di Afrika Selatan (Kelly, 2013). Visi Nelson Mandela pada saat itu yaitu membentuk masyarakat yang bebas dari penindasan *gender* dan segala bentuk ketidaksetaraan. Visi tersebut termasuk radikal, mengingat Afrika Selatan bahkan masih dalam perjalanan untuk melepaskan politik Apartheid-nya, yang tentu saja merupakan ketidaksertaraan yang terjadi di masyarakat dalam segala aspek. Komisi tersebut, hingga saat ini, merupakan angin

segar bagi para wanita di Afrika Selatan, karena komisi tersebut merupakan badan resmi yang legalitasnya tercantum di Section 187 di *Constitution of the Republic of South Africa* (Commission for Gender Equality, n.d.).

Tidak hanya pada level domestik, Nelson Mandela juga menjadi pelopor Afrika Selatan menandatangani, namun belum meratifikasi, CEDAW pada 1993. Kemudian, pada 1995, ketika Nelson Mandela sudah resmi menjadi presiden Afrika Selatan, negara tersebut langsung meratifikasi CEDAW dan konvensi internasional HAM lainnya seperti CRC, CCPR, CERD, dan CAT.

Daftar aksi nyata Nelson Mandela dalam mengurangi GBV di Afrika Selatan masih panjang. Pada 1995, Nelson Mandela juga merekomendasikan perawatan prenatal dan postnatal gratis untuk ibu dalam sistem kesehatan masyarakat di Afrika Selatan, serta perawatan kesehatan gratis untuk anak-anak sampai usia enam tahun (Global Citizen, 2013).

Selain itu, Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga 116 tahun 1998 (*Domestic Violence Act 116 of 1998*) juga disahkan pada masa pemerintahan Nelson Mandela. UU tersebut memberikan kesempatan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk dapat mencari Protection Order dari Pengadilan Magistrate terhadap pelaku pelecehan dan/atau kekerasan dalam rumah tangga (Department of Justice and Constitutional Development of Republic of South Africa, n.d.).

Usaha Nelson Mandela masih terus berlanjut bahkan setelah beliau tidak lagi menjabat di pemerintahan. Namun, hal-hal yang telah dijabarkan di atas merupakan bukti keseriusan yang dilakukan Presiden Nelson Mandela yang merupakan batu loncatan dan dasar bagi usaha-usaha presiden lain untuk Afrika Selatan yang lebih terbuka dengan kesetaraan *gender* dan HAM masyarakat Afrika Selatan.

2.5.2. Thabo Mbeki Masih Menjadikan Kesetaraan *Gender* sebagai Agenda Utama Pemerintahan Afrika Selatan

Usaha Afrika Selatan dalam memerangi GBV di negaranya masih terus menghadapi tantangan. Meskipun Presiden Nelson Mandela telah memberikan permulaan yang bagus, implementasi dari UU dan konvensi internasional yang berhubungan dengan kesetaraan *gender* masih sulit untuk dicapai secara maksimal.

Pada masa pemerintahan Thabo Mbeki yang dimulai pada tahun 1999 setelah Nelson Mandela tidak lagi menjabat sebagai pemimpin negara Afrika Selatan, GBV masih terus dijadikan agenda utama pemerintah Afrika Selatan. Thabo Mbeki, pada pidatonya saat memperingati Hari Perempuan atau *Women's Day* 2008 silam, juga menyebutkan bahwa kejahatan terhadap perempuan (*Violence against Women*) “merusak demokrasi” Afrika Selatan (Mail & Guardian, 2008).

The continued perpetration of these barbaric acts of gender violence is an indictment on all of us and should, correctly, make us angry even as it propels us to intensify our efforts to end this social malaise. – Thabo Mbeki.

Tahun 2003/4 merupakan salah satu tahun terkelam di Afrika Selatan karena angka GBV di negara tersebut sangat tinggi. Laporan resmi dari pemerintah Afrika Selatan menunjukkan bahwa pada 2003, terdapat 52,733 kasus pemerkosaan yang dilaporkan ke polisi (Louw, 2005). Angka tersebut hanya berbeda sedikit dari angka kasus pemerkosaan yang terlapor pada 1999-2000 yaitu sebanyak 52,891 kasus. Sayangnya, angka-angka tersebut bahkan tidak merepresentasikan keadaan yang sebenarnya di lapangan, karena kepolisian Afrika Selatan menyatakan bahwa hanya 3% dari semua kasus pemerkosaan di Afrika Selatan pada tahun 2003 yang dilaporkan (Britton, 2006).

Meskipun begitu, Presiden Thabo Mbeki tidak menyerah. Beliau bersama para aktivis anti-pemerkosaan dan penyintas pemerkosaan, memberikan sudut pandang mereka di pers nasional. Thabo Mbeki menyatakan bahwa pemerkosaan telah menjadi bagian dari “cara hidup” atau “gaya hidup” di Afrika Selatan (Britton, *Organising against Gender Violence in South Africa*, 2006).

Selain pembahasan GBV di pidato kepresidenan dan acara resmi yang melibatkan media dan press, Presiden Thabo Mbeki juga melakukan beberapa aksi nyata, salah satunya dengan diadopsinya “365 Day National Action Plan to End Gender Violence” pada 2008 (Women's Voice & Leadership South Africa, 2021). Dokumen tersebut merupakan langkah dan rencana konkrit pemerintah Afrika Selatan dalam memperingati “16 Days of Activism against Gender-Based Violence” yang

diinisiasi UN Women. Partisipasi Thabo Mbeki terhadap visi dan nilai UN Women tidak berhenti di situ. Pada tahun 2005, di bawah pemerintahan Thabo Mbeki, Afrika Selatan juga meratifikasi CEDAW Optional Protocol (United Nations Treaty Collections, n.d.).

Tidak hanya itu, pemerintah Afrika Selatan di bawah kepemimpinan Thabo Mbeki juga menginisiasi “South Africa’s National Policy Framework for Women’s Empowerment and Gender Equality” pada 2002 (Western Cape, 2008). Kerangka kerja ini didasari oleh definisi dan tujuan Afrika Selatan untuk mencapai kesetaraan *gender*, di mana visi hak asasi manusia yang integral dengan penerimaan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua masyarakat, baik wanita maupun pria. Cita-cita dan prinsip ini didasari oleh prinsip *Bill of Rights of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996* (Bill of Rights, bagian 9.1 hingga 9.4) (South Africa's Environmental Affairs, 2002).

Respons pemerintah Afrika Selatan di bawah kepemimpinan Thabo Mbeki masih sejalan dengan visi dan misi pemerintahan Nelson Mandela dalam memerangi ketidaksetaraan *gender* dan memberikan tempat aman bagi para korban GBV di Afrika Selatan.

2.5.3 Kurangnya Alokasi Dana dan Integrasi antar Badan Pemerintah Afrika Selatan dalam upaya Menangani GBV pada Periode Presiden Jacob Zuma

Usaha pemerintah Afrika Selatan dalam memerangi GBV mengalami tantangan lebih besar saat masa pemerintahan Presiden Jacob Zuma pada tahun 2009 hingga 2017. Bukan karena memerangi GBV dan mencapai

kesetaraan *gender* disingkirkan dari agenda pemerintah Afrika Selatan, namun karena masyarakat tidak merasakan aksi nyata atau hasil dari janji Presiden Jacob Zuma perihal GBV di Afrika Selatan (Mofana, 2015). Afrika Selatan kembali menghadapi periode tergelapnya karena pada masa kepresidenan Jacob Zuma, Human Rights Watch mempublikasikan laporan resminya yang menyatakan kasus kejahatan terhadap wanita berada di puncak tertinggi sepanjang sejarah Afrika Selatan (Human Rights Watch, 2012). Selain itu, pada periode 2010 hingga 2012, antara 50 sampai 77% wanita di Afrika Selatan pernah mengalami berbagai macam kekerasan di hidup mereka (Oxford Human Rights Hub, 2013). Laporan yang dipublikasikan oleh Oxford Human Rights Hub tersebut juga memiliki judul yang cukup menunjukkan rasa kekecewaan terhadap Presiden Jacob Zuma, yaitu: “President Zuma and the ANC Still Have Not Got the Message.”

Meskipun begitu, tidak berarti Presiden Jacob Zuma sepenuhnya diam dan tidak membuat rencana apapun untuk mengurangi kejahatan terhadap wanita. Pada pidato beliau tahun 2013 saat acara tahunan pembukaan parlemen SONA (*State of the Nation Address*), Presiden Jacob Zuma menyatakan bahwa meningkatkan status wanita di Afrika Selatan merupakan prioritas utama pemerintah negara tersebut, serta merekomendasikan *Women Empowerment and Gender Equality Bill*. Meskipun Undang-Undang tersebut kemudian disahkan pada tahun yang sama, masyarakat Afrika Selatan masih merasakan kekecewaan karena

implementasi dari Undang-Undang tersebut belum dirasakan secara nyata. Salah satu contohnya yaitu alokasi sumber daya dan pendanaan untuk implementasi UU Domestic Violence Act 1998. UU tersebut membahas mengenai pemberian hukuman untuk pelaku kekerasan GBV, namun tidak ada dana eksplisit yang diarahkan untuk melaksanakan mandate legislative polisi berdasarkan UU tersebut (Oxford Human Rights Hub, 2013). Sehingga, masyarakat Afrika Selatan merasa bahwa Presiden Jacob Zuma hanya serius dalam menyatakan bahwa beliau ingin fokus dalam menangani kasus GBV di negaranya, namun secara praktik, beliau kurang langkah konkrit dan terkesan kurang serius.

Tidak adanya rencana pendanaan yang jelas bukan merupakan satu-satunya masalah. Kurangnya kerja sama antar departemen di pemerintah Afrika Selatan juga menjadi agenda yang dibawa oleh masyarakat Afrika Selatan dan organisasi hak asasi manusia internasional (Budoo-Scholtz, 2022). Catatan buruk Presiden Jacob Zuma tersebut membuat masyarakat Afrika Selatan merasa bahwa perjuangan mendapatkan hak asasi dan kesetaraan *gender* masih sulit dan jauh.

2.5.4. Respons Pemerintah Afrika Selatan Selama Masa Kepemimpinan Cyril Ramaphosa Tahun 2018 hingga 2023

Angin segar mulai terasa kembali di Afrika Selatan sejak kepresidenan Cyril Ramaphosa pada 2018. Presiden Cyril Ramaphosa menjadi pelopor terbentuknya *National Strategic Plan on Gender-Based Violence and Femicide* pada 2019 untuk lima tahun ke depan, pengadilan khusus untuk

kasus GBV, National Council on GBV, serta turun langsung ke masyarakat dan berbaur dengan gerakan masyarakat dan LSM. Meskipun demikian, masih banyak berita nasional yang pada akhirnya menjadi isu besar di dunia internasional mengenai GBV di Afrika Selatan pada masa pemerintahan Cyril Ramaphosa.

Pada 2019, ratusan wanita Afrika Selatan melakukan demonstrasi di depan gedung pemerintahan setelah tiga wanita di Universitas Cape Town dibunuh. Cyril Ramaphosa cepat dalam menanggapi protes tersebut dengan cara memberikan alokasi dana yang lebih untuk menangani kasus GBV secara spesifik (Mlaba, 2020).

Presiden Cyril Ramaphosa juga menyebutkan bahwa kejahatan berbasis *gender* di Afrika Selatan seperti pandemi kedua setelah COVID-19, dan patut untuk ditindaklanjuti secara serius (Ndawonde, 2023).

We have said before that the violence perpetrated by men against women is the second pandemic that our country must confront, and like the COVID-19 pandemic it can be overcome if we all work together. – Thabo Mbeki.

Pada level domestik, Cyril Ramaphosa banyak mengesahkan UU baru terkait GBV dan juga mengamandemen beberapa UU lama supaya bisa diimplementasikan lebih baik. Salah satunya Criminal Law (*Sexual Offences and Related Matters*) Amendment Act Bill, Criminal Law Amendment Bill, dan Criminal and Related Matters Amendment Bill (South Africa Government, 2023). Selain itu, beberapa UU baru yang dibuat yaitu *Harrasment and Stalking Bill* pada Maret 2021, yang

bertujuan untuk menyediakan perlindungan tambahan bagi korban kekerasan dan penguntitan dan *Firearms Control Act*, di mana pada konteks GBV, penggunaan senjata api dan senjata tajam merupakan kasus yang sering terjadi. UU tersebut penting untuk meregulasi dan memberikan hukuman setimpal bagi pelaku kekerasan.

Keseriusan Cyril Ramaphosa juga terlihat melalui keterlibatannya di forum regional dan level internasional. Salah satu contohnya yaitu menjadi bagian dan pendukung dari agenda 2063 African Union yang mempromosikan kesetaraan *gender*, mencegah dan merespon GBV dan meningkatkan pemberdayaan wanita (African Union, 2021). Selain itu, Afrika Selatan, di bawah kepemimpinan Cyril Ramaphosa juga menjadi bagian dari SADC (*Southern African Development Community*) *Protocol on Gender Development*. Usaha Presiden Cyril Ramaphosa untuk memerangi GBV di Afrika Selatan masih terus berlanjut hingga saat ini, meskipun angka GBV di negara tersebut masih tinggi. Namun, usaha pemerintah Afrika Selatan sudah dapat terlihat bahkan sejak awal meratifikasi CEDAW.